

Dr. Sulaeman Rahman Nidar

TEROPONG KEUANGAN

EKONOMI BANGSA
TANGGAPAN DAN SOLUSI



PRC
PUSTAKA REKA CIPTA

Daftar Isi

Kata Sambutan ~ v

Pengantar ~ vii

Daftar Isi ~ ix

Pendahuluan

I. Corak dan kondisi ~ 1

1. Industri Kreatif Demi Kesejahteraan Bangsa ~ 2
2. Sarjana dan Industri Kreatif ~ 6
3. Kondisi Keuangan Pascabom Mega Kuningan ~ 9
4. Sektor Keuangan Menjelang Sekitar 2009 ~ 13
5. Tidak ada Rotan Mereka pun Menganggur ~ 17
6. Tertipu Kembali ~ 23
7. Melindungi diri dari Penipuan Berkedok Investasi ~ 27
8. Waspada terhadap Risiko Investasi ~ 33
9. Investasi, Solusi, Pemerintah, Perusahaan ~ 39
10. Utang Pemerintah dan KTT G-20 ~ 46

II. Lingkup Manajemen ~ 51

11. Stakeholder PTN ~ 52
12. Manajemen Aset dan Rebutan Aset Daerah ~ 60
13. Membangun Strategik Vision dengan Pendekatan 5 A ~ 63
14. Mengevaluasi Kinerja Reksa Dana saat Rupiah Bergejolak ~ 70

15. Krisis Reksa Dana, Kinerja Obligasi, dan Reksa Dana Proteksi ~ 77
 16. Keuntungan Menerbitkan Obligasi ~ 83
 17. Menghindari Krisis Ekonomi Jilid III ~ 94
 18. Peranan Profesi Penilai Aset ~ 98
 19. Antara Teori dan Aplikasi Strategic Asset Management ~ 104
- III. Gejolak Ekonomi dan Keuangan ~ 115**
20. Harga Minyak Melonjak dan Harga Saham Bergejolak ~ 116
 21. Buruh Demo Pengusaha Bingung ~ 119
 22. Bursa Efek Indonesia Tersungkur ~ 123
 23. BEI setelah Deklarasi Capres-Cawapres ~ 129
 24. Bank Century dan Kepemilikan Saham Publik ~ 133
 25. BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah ~ 137
 26. Menkeu Baru Pro-pasar dan Anjloknya IHSG BEI ~ 140
 27. Menyelamatkan Investasi Saat Rupiah Melemah ~ 145
 28. Obligasi Bank Jabar dan Sektor Riil ~ 149
 29. Rupiah Menguat, PHK Meningkat ~ 153
 30. Etika Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ~ 159
 31. Pengumuman Emiten Terbaik Tidak Ditanggapi oleh Pasar ~ 168

Daftar Pustaka ~ 189

Tentang Penulis

Keuntungan Pemprov Jabar Menerbitkan Obligasi Oleh : Sulaeman Rahman*)

Pemprov Jawa Barat akan menerbitkan obligasi pada tahun 2006. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam sesi pemaparan Pemprov Jabar untuk menjelaskan mengenai potensi ekonomi dan prospek investasi di Jawa Barat pada kegiatan Simposium yang dilaksanakan di Unpad Mei 2005 . Suatu kebanggaan bahwa sampai sekarang belum ada satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia yang menerbitkan obligasi. Dan rasanya pernyataan Bapak Gubernur mengenai rencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah daerah (municipal bond) menjadi daya tarik untuk dianalisis keuntungan dari sisi pandangan ekonomi dan pembangunan Jabar , sehingga penerbitan obligasi bukan merupakan hal yang dikhawatirkan karena ikut-ikutan atau ingin dianggap lebih maju dibanding dengan daerah lain tanpa melihat aspek keuntungan bagi masyarakat.

Otonomi Daerah dan Obligasi

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Adanya momentum otonomi daerah, banyak pemerintah daerah yang mulai tertarik dan berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom.

Sesuai UU No 22 tahun 1999 menjelaskan daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperjelas pada PP no 84 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 point e, dinyatakan bahwa Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Otonomi daerah telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan kemampuan yang dimilikinya. Pemerintah daerah